

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

TRANSFORMASI PEMERINTAH LOKAL: PENERAPAN SMART GOVERNANCE MELALUI KONSEP KOLABORATIF DI INDONESIA

Riska Sarofah^a

^a Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

e-mail : riskasarofah@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis proses transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan *smart governance* yang kolaboratif. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelayanan pemerintahan daerah yang belum memberikan praktik kerja dengan keterlibatan berbagai stakeholders. Penelitian ini menjelaskan secara singkat pola kerja kolaboratif dalam menyelesaikan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi pada provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka berupa referensi primer yaitu jurnal, artikel, berita dan laporan kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerja kolaboratif harus didukung oleh prinsip kepemimpinan, kolaborasi dan peningkatan infrastruktur layanan informasi dan komunikasi. Dalam hal transformasi lokal semenjak pandemi pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah merespon masalah ini dengan meningkatkan layanan informasi melalui digital. Sementara dalam hal pelaksanaan prinsip smart governance didasarkan pada prinsip Pentha-Helix dengan kolaborasi dari berbagai stakeholders, misalnya masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Kata Kunci: smart governance, kolaborasi, transformasi dan covid-19.

Abstract

This study aims to systematically analyze the transformation process carried out by local governments in an effort to realize collaborative smart governance. This paper is motivated by the many local government services that have not provided work practices with the involvement of various stakeholders. This study briefly describes the pattern of collaborative work in resolving the pandemic covid-19 and economic recovery in the provinces of West Java and Central Java. This study uses qualitative research methods through library studies whose sources are journals, articles, news, and government performance reports. The results of the study indicate that the collaborative work pattern must be supported by the principles of leadership, collaboration, and improvement of information and communication service infrastructure. In terms of local transformation since the pandemic, the governments of West Java and Central Java responded to this problem by improving information services through digital. Meanwhile, in terms of implementation the smart governance principle is based on the Pentha-Helix principle with collaboration from various stakeholders, such as the community, government, private sector, academics and the media.

Keywords: smart governance, collaboration, transformation and covid-19..

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pelayanan pemerintahan yang memberikan dampak menyeluruh kepada masyarakat perlu diperhatikan secara responsif. Hal ini dapat dikaitkan dengan masalah global pandemic covid-19 yang menuntut semua layanan pemerintahan baik pusat dan daerah untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan publik. Menurut United Nation e-Government Survey pada tahun 2020 bahwa Indonesia menduduki posisi 88 dengan rata-rata skor 0.6612 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018.

Grafik 1.1
e-government Index Indonesia di Dunia



Sumber: UN E-Government Survey diakses melalui

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020>

Indikator yang digunakan untuk mengukur index e-government antara lain :

Tabel 1.1

Index e-government di Indonesia

No.	Indikator	Nilai
1.	Indeks Pelayanan Online	0,6284
2.	Indeks Infrastruktur Telekomunikasi	0,5669
3.	Indeks Sumber Daya Manusia	0,7325

Sumber: UN E-Government Survey, 2020.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa open government index Indonesia sudah cukup baik dengan rata-rata 0,75 (dengan predikat very high open Government Development Index). Ini juga sebagai bukti bahwa seabagai salah satu Kawasan Asia Tenggara,

Indonesia dapat menunjukkan proses transformasi digital yang cukup baik.

Predikat ini harus mampu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia dengan membangun konsep kolaborasi yang memadai. Penerapan pemerintahan berbasis teknologi bukan hanya perlombaan bagi setiap pemerintah daerah dengan jumlah pelayanan yang berbasis online, lebih dari itu harus menjamin bahwa semua prosesnya dijalankan secara kolaboratif dan terbuka.

Tata Kelola pemerintahan yang cerdas atau dikenal dengan Smart Governance merupakan salah satu domain studi yang menarik perhatian secara ilmiah dan mempengaruhi proses kebijakan. Smart Governance tidak terlepas dari penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan berupaya untuk meningkatkan pengambilan keputusan melalui kolaborasi yang lebih baik diantara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan warga negara. Smart governance dapat dicontohkan melalui penggunaan sosial media dan keterbukaan informasi. Smart governance adalah model tata Kelola baru dalam mengatasi tantangan masyarakat digital, tata Kelola kolaboratif, berbagi informasi dan keterlibatan warga (Pereira, 2018).

Menurut (Manda & Backhouse, 2019) terdapat 3 indikator penting dalam smart governance dalam upaya mendorong transformasi digital, antara lain:

1. Kepemimpinan dan tata Kelola
2. Integrasi dan kolaborasi
3. Perkembangan infrastruktur layanan informasi dan komunikasi.

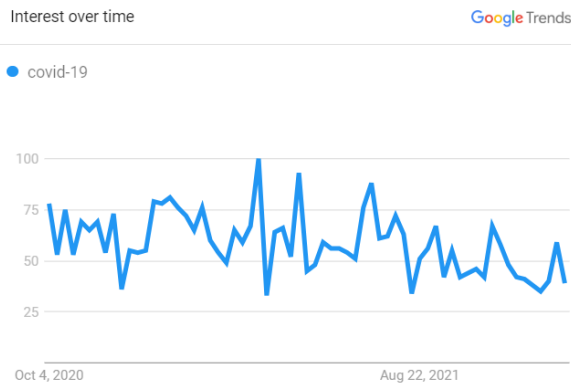
Kepemimpinan menjadi salah satu indikator dalam transformasi smart governance pada level local dengan tidak hanya memberikan keefektifan dalam pelayanan pemerintahan, namun juga harus mampu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada warga (Ncamphalala, 2019). Struktur dan proses administrasi dari berbagai Lembaga dan departemen pemerintah daerah menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan pemerintahan cerdas (Alawadhi & J. Scholl, 2016).

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Smart governance menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik terutama di era pandemi. Masyarakat menjadi sangat terbiasa dan bergantung pada pelayanan yang mengutamakan aspek teknologi.

Salah satu isu yang dibahas pada artikel ini adalah bagaimana transformasi pemerintah local di Indonesia untuk melakukan sinergisitas dalam pengembangan smart governance terutama ketika masa dan pasca pandemi covid 19.



Gambar 1.1
Google trends dengan kata kunci covid-19
Sumber: Google trends, 2022.

Penulis melakukan penelusuran terhadap topik covid-19 pada pelayanan pemerintahan didapatkan bahwa banyak penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan informasi seputar covid-19 misalnya masalah vaksinasi dan pelayanan online pemerintah.

Perkembangan smart governance sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan implementasi dari kota cerdas (Lii Inn, 2020). Setelah berhasil dalam perkembangan e-government, tentunya pemerintah harus membuka peluang bagi penggunaan Artificial Inteligent sebagai refleksi dari pencapaian smart governance sebagai domain utama dalam smart city (Saadah, 2021). Lebih dari itu menurut (Tomor et al., 2019) peran kelembagaan juga menjadi faktor penting kesuksesan smart governance. Hubungan antara kota madya lokal dan warga serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk badan administrasi publik secara signifikan menjadi kekuatan smart governance (Vitálišová et al., 2022).

Konsep smart governance harus mementingkan prinsip keadilan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Konsep smart governance

No.	Smart Justice	Smart Governance
1.	Pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial.	Peran masyarakat terlibat secara sadar. Menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah
2.	Transparansi dan Inklusivitas	Menciptakan tata Kelola yang cerdas Transparansi dalam berbagi informasi publik. Pengambilan keputusan yang inklusif.
3.	Ekuitas dan akses	Akses yang adil pada informasi publik Akses adil pada sumber daya Memfasilitasi akses publik.
4.	Keadilan dalam pengawasan Mengurangi diskriminasi	Melindungi privasi Pengawasan dengan persetujuan Memiliki keadilan dalam proses pelayanan.

Sumber: (Choi et al., 2021).

Pembatasan sosial akibat pandemic covid-19 menuntut pemerintah untuk mengembangkan teknologi cerdas dan kecepatan dalam berinovasi. Tata Kelola yang cerdas mampu mengaktifkan keadilan dalam berbagi informasi layanan publik.

Penanganan kasus covid-19 bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat, namun perubahan signifikan pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sektor lain yang terkena imbasnya perlu didukung oleh peran pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian ini secara spesifik akan menganalisis transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan smart governance di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis naratif dengan pendekatan tinjauan Pustaka yang sistematis (Creswell et al., 2007). Peneliti mengumpulkan sumber yang relevan dari buku,

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

jurnal dan juga website pemerintah untuk mendalami informasi smart governance dan penerapannya di Indonesia, terutama 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

B. PEMBAHASAN

Inisiatif secara sistematis ditingkatkan lokal menjadi peranan penting yang bertindak sebagai katalisator dan pendukung inovasi sosial dan tata kelola digital. Melibatkan penerima manfaat dari layanan tertentu menjadi pendorong utama sebagai kemampuan Kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya memperluas kolaborasi dengan masyarakat lokal. Hasil studi di Eropa membuktikan bahwa inovasi sosial yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi untuk memberdayakan partisipasi warga, pada saat yang sama pemerintah harus memanfaatkan dengan menciptakan layanan baru (Misuraca et al., 2021).

Pada pembahasan artikel ini akan dibahas melalui 3 sub bagian penting yaitu transformasi lokal pada pemerintah daerah, pentingnya pengembangan smart governance dan pengembangan konsep kolaboratif. Peneliti mengambil Batasan dalam penanganan covid-19 dan keberlanjutan proses kolaborasinya hingga sekarang.

Smart governance secara luas dicirikan sebagai pemerintah yang menggunakan teknologi untuk mengubah diri mereka sendiri, komunikasi mereka dengan orang-orang, dan hubungan mereka dengan penduduk, perusahaan, aktor non-negara yang menghasilkan efek sosial (Viale Pereira et al., 2018; Zhou, 2020).

Transformasi Lokal dalam penanganan pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengubah pola kerja pemerintah daerah untuk terus menggunakan layanan informasi dan komunikasi melalui penggunaan layanan berbasis elektronik. Salah satunya dengan melakukan evaluasi rutin dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil 2 studi kasus yaitu pada Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai daerah yang jumlah penduduk tinggi sehingga mengalami kompleksitas dalam

penyelesaian covid-19. Dalam proses penanganan covid-19 di Jawa Barat, pemerintah menginisiasi dengan mengembangkan media komunikasi dan informasi melalui visualisasi data dan perkembangan terkini kasus covid-19 (<https://pikobar.jabarprov.go.id/>). Sementara pada daerah Jawa Barat, pemerintah melakukan percepatan penyelesaian covid-19 dengan adanya program tanggap covid-19 dengan up-to-date dalam menyampaikan informasi covid-19 dan layanan public lainnya (<https://corona.jatengprov.go.id/>).

Transformasi pemerintah daerah tidak cukup hanya pada layanan berbasis online, namun juga harus dikembangkan dengan layanan integrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan penyediaan data dan informasi sectoral bagi publik secara terintegrasi dengan penyediaan aplikasi online MuDaBerdasi (Monitoring Satu Data Berkualitas dan Terintegrasi) (Gunawan, 2022). Integrasi layanan juga dikembangkan oleh Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah. Tujuan utama dari satu data adalah memperoleh data yang akurat dan terpadu.

Layanan online dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan keberhasilan tata Kelola pemerintahan. Pemerintah daerah masih mengalami tantangan dalam hal integrasi data. Hal ini dibuktikan dengan baru diimplementasikan inovasi ini pada tahun 2022. Oleh karena itu sinergisitas antara dinas, badan dan masyarakat menjadi faktor penentu dari transformasi lokal.

Smart Governance dan Kerja Kolaboratif pada Pemerintah Daerah

Pasca pandemic juga akan menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis pola kerja yang kolaboratif dalam pemulihan ekonomi pemerintah daerah. Beberapa upaya kolaboratif berfokus pada perubahan sistem misalnya mengubah struktur yang ada, menciptakan hubungan baru, meningkatkan akses klien pada layanan yang lebih baik (Liu & Zheng, 2018).

Program percepatan penanganan covid-19 di Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendukung proses penyelesaian pandemic dan pemulihan ekonomi. Terdapat program utama pemerintah daerah Jawa Barat antara lain PUSPA (Puskesmas

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Terpadu dan Juara) dan program petani millennial. Prinsip kolaborasi Penta Helix menjadi salah satu unggulan dalam kerja kolaboratif Pemerintah Daerah yaitu melalui proses kolaborasi, hubungan interaksi antara berbagai kelompok kebijakan, serta koordinasi yang intensif. Menurut (Fitrianingrum, 2020) kepemimpinan yang aspiratif juga mendorong pola kerja kolaboratif yang berhasil.

Pemimpin lokal di daerah memiliki peran dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, mengeluarkan kebijakan publik di daerah, serta mendorong partisipasi warga (Hanafi et al., 2020). Seperti halnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa kolaborasi yang dibangun bagi pertumbuhan UMKM dengan platform E-commerce. Pemulihan ekonomi juga menjadi alasan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder lain.

Pengembangan Konsep Kolaboratif pada Pemerintah Daerah.

Penta-helix merupakan perpanjangan strategi dari teori triple-helix melalui keterlibatan dari elemen masyarakat dan non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi (Lindmark et al., 2009). Kolaborasi Penta-Helix harus mampu diimplementasikan oleh pemerintah daerah karena memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah covid-19 dan pemulihannya (Budhi et al., 2022). Kolaborasi Penta-Helix sebagai kegiatan kolaboratif yang terdiri dari akademisi, dunia usaha/korporasi, masyarakat, pemerintah dan media. Pertama, akademisi sebagai sumber pengetahuan/penelitian. Kedua, swasta sebagai entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, masyarakat berperan sebagai perantara antara kelompok kepentingan dengan masyarakat itu sendiri. Keempat, pemerintah sebagai salah satu perumus dan pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kelima, media bertindak sebagai pendukung publikasi dan proses sosialisasi kepada masyarakat (Sari et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2021).

Terdapat 3 tahapan utama dalam upaya penanganan covid-19. Pertama, rescue sebagai ekonomi harus diberikan kepada masyarakat dan pihak yang terkena dampak covid-19.

Kedua, stability dimana masyarakat terbiasa dengan menerapkan protocol Kesehatan. Ketiga, recovery dengan melakukan kegiatan secara normal terutama dalam pemulihan ekonomi (Ishak & Sholehah, 2021).

Pemerintah daerah senantiasa menjalin kolaborasi, koordinasi dan kemitraan salah satunya untuk membentuk sistem Kesehatan yang Tangguh berkolaborasi dengan mitra di dalam dan luar sistem Kesehatan (<http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>).

Kegagalan penggunaan media baru menjadi salah satu persoalan yang muncul di era normal. Oleh karena itu koordinasi antar instansi yang bertanggungjawab terhadap layanan publik mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi poin fundamental untuk meminimalisir pelayanan public yang buruk. Koordinasi yang dibangun harus didasarkan pada kesadaran kolektif yang dilakukan secara responsif (Syaidah, 2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa inovasi antara lain konsep Penta Helix dan implementasi program kampung digital.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi penyelesaian covid-19 oleh pemerintah daerah yang perlu menerapkan prinsip smart governance yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, integrasi dan kolaborasi, serta pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi. Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan tingkat penanganan covid yang sistematis sebanding dengan jumlah penduduk yang banyak, perlu menerapkan dan secara berkelanjutan mengimplementasikan prinsip kolaboratif baik dari masyarakat, pemerintah, akademisi, swasta maupun media.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini dalam penerapan smart governance adalah pelayanan publik yang belum mampu terintegrasi dengan baik antar instansi maupun Lembaga. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi penerapan prinsip digital dalam pelayanan yang juga didukung oleh pola-pola kerja yang kolaboratif. Pola kerja yang seperti ini akan membantu dalam meningkatkan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

REFERENSI

- Alawadhi, S., & J. Scholl, H. (2016). Smart governance: A cross-case analysis of smart city initiatives. In *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 2953–2963).
<https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.370>
- Budhi, M. K. S., Lestari, N. P. N. E., & Suasih, N. N. R. (2022). the Recovery of the Tourism Industry in Bali Province Through the Penta-Helix Collaboration Strategy in the New Normal Era. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 40(1), 167–174.
<https://doi.org/10.30892/GTG.40120-816>
- Choi, J., Lee, S., & Jamal, T. (2021). Smart Korea: Governance for smart justice during a global pandemic. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(2), 540–549.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1777143>
- Creswell, J. ., Hanson, W. ., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264.
- Fitrianingrum, L. (2020). Policy Strategy of Covid-19 Handling Toward Regional Economic Recovery of West Java Province. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 71–86.
- Gunawan, I. (2022). Kolaborasi Antar Instansi, Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi.
<https://www.sonora.id/read/423191305/kolaborasi-antar-instansi-pemprov-jabar-luncurkan-aplikasi>.
- Hanafi, R. I., Syafii, I., Ramadhan, M. S., & Prayoga, P. (2020). Kepemimpinan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, Dan Panggung Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 195–218.
- Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 207.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726>
- Lii Inn, T. (2020). Smart City Technologies Take on COVID-19. In *Smart Cities*.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/11426.003.0005>
- Lindmark, A., Roos, M. ., & Sturesson, E. (2009). *Difficulties of Collaboration for Innovation – A study in the Oresund Region*. Lund University.
- Liu, X., & Zheng, L. (2018). Cross-departmental collaboration in one-stop service center for smart governance in China: Factors, strategies and effectiveness. *Government Information Quarterly*, 35(4), S54–S60.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.001>
- Manda, M. I., & Backhouse, J. (2019). Smart governance for inclusive socio-economic transformation in South Africa: Are we there yet? *Public Administration and Information Technology*, 34, 179–201.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-89474-4_9
- Misuraca, G., Lipparini, F., & Pasi, G. (2021). Towards Smart Governance: Insights from Assessing ICT-Enabled Social Innovation in Europe. In *Springer, Cham*. (pp. 217–238).
- Ncamphalala, M. (2019). The role of ICT to promote smart governance in local governments. *College of Business and Economics University of Johannesburg*, August.
<https://core.ac.uk/download/pdf/245881137.pdf>
- Pereira, G. V. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. In *Information Polity* (Vol. 23, Issue 2, pp. 143–162).

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- <https://doi.org/10.3233/IP-170067>
Saadah, M. (2021). Artificial Intelligence for Smart Governance; towards Jambi Smart City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 717, Issue 1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012030>
- Sari, Y. R., Handayani, D. W., Marta, A., Desiana, V., & Wiranata, I. J. (2022). Penta Helix Collaboration on Village Tourism Development Program in Indonesia Post Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 628(ULICoSS 2021), 25–32.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.004>
- Syaidah, S. (2020). Inovasi Layanan Publik Pusat Informasi Dan Koordinasi Jawa Barat (Pikobar) Saat Pandemi Covid-19. *Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 148–158.
<http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/1730>
- Tomor, Z., Meijer, A., Michels, A., & Geertman, S. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. *Journal of Urban Technology*, 26(4), 3–27.
<https://doi.org/10.1080/10630732.2019.1651178>
- Viale Pereira, G., Eibl, G., & Parycek, P. (2018). The Role of Digital Technologies in Promoting Smart City Governance. *The Web Conference 2018 - Companion of the World Wide Web Conference, WWW 2018*, 911–914.
<https://doi.org/10.1145/3184558.3191517>
- Vitálišová, K., Sýkorová, K., Koróny, S., & D, R. (2022). Benefits and Obstacles of Smart Governance in Cities. In *International Summit Smart City*, 366–380. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06371-8_24
- Wahyuningsih, E., Yunas, N. S., & Rohmad Jatmiko, A. (2021). Strengthening Community in Increasing Village Potential Through Pentahelix Collaboration. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 10(1), 149–157.
<https://www.ssbfnct.com/ojs%0A/index.php/ijrbs>
- Zhou, S. (2020). Exploring development of smart city research through perspectives of governance and information systems: a scientometric analysis using CiteSpace. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 11(4), 431–454.
<https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2019-0051>